

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN SESUDAH PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RSUD IDAMAN BANJARBARU KOTA BANJARBARU

**Arsa Nur Azhari Winarso**

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin  
Jl. A. Yani Km. 5,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
*e-mail*: arsawinarso@gmail.com

**Abstract:** The aims of this study is to analyze and describe the achievement of financial performance and the results obtained on the evaluation of financial performance at the RSUD Idaman Banjarbaru after the implementation of PPK-BLUD in the period 2013 until 2016. The method used is by calculating the financial ratio consisting of cash ratio, current ratio, receivable collection period, fixed asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio, equity ratio, inventory turnover, PNB ratio to operational cost, patient subsidy cost ratio and value financial performance by Per-34 / PB / 2014 from 2013 to 2016. The results showed that the financial performance of RSUD Idaman Banjarbaru obtained fluctuating results although tend to be almost the same during the year 2013-2016, and the value of financial performance obtained good criterion (A) with a value of 73.68%.

**Keywords:** *PPK-BLUD, Financial Performance, Hospital, Financial Ratio*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan capaian kinerja keuangan dan hasil yang didapat atas penilaian kinerja keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Banjarbaru setelah penerapan PPK-BLUD periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung nilai rasio keuangan yang terdiri atas rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, rasio perputaran aktiva tetap, rasio perputaran aktiva tetap, rasio ekuitas, perputaran persediaan, rasio PNB terhadap biaya operasional, rasio biaya subsidi pasien dan nilai kinerja keuangan menurut Per- 34 / PB / 2014 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD Idaman Banjarbaru memperoleh hasil yang fluktuatif meskipun cenderung hampir sama selama tahun 2013-2016, dan nilai kinerja keuangan memperoleh kriteria Baik (A) dengan nilai 73,68%.

**Kata Kunci :** *PPK-BLUD, Kinerja Keuangan, Rumah Sakit, Rasio Keuangan*

## **Latar Belakang**

Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya guna menyejahterakan rakyat. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan

Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah memberikan otonomi kepada daerah terutama instansi pemerintah daerah dalam bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Instansi yang diberikan kelonggaran pengelolaan keuangan adalah instansi yang tugasnya memberikan pelayanan bagi masyarakat. Rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan di bidang kesehatan termasuk instansi yang diberikan fleksibilitas tersebut, yaitu dengan diberlakukannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi rumah sakit. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dengan diterapkannya PPK-BLUD pada rumah sakit, diperlukan perubahan paradigma dalam organisasi yang tadinya sosial demokratis menjadi lembaga sosial yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, namun tetap mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang diberikan. Rumah sakit menjadi lembaga sosial non-profit yang menguntungkan agar dapat membiayai sebagian kegiatan operasionalnya sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya. Oleh karena itu rumah sakit harus didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang otonom, transparan, fleksibel dan akuntabel sehingga operasional rumah sakit dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Banjarbaru sebagai instansi pemerintah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan–Badan Layanan Umum Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan disamping dalam bidang kesehatan juga dalam hal pengelolaan keuangannya baik kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan yang diberikan dan kepada pemerintah daerah selaku stakeholder. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan–Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Banjarbaru ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 366 tanggal 29 Desember 2011. Melalui penerapan PPK-BLUD ini, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan produktifitas pelayanan dengan melakukan terobosan baru dalam menggali potensi-potensi pendapatan dan meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pelayanan agar rumah sakit diharapkan dapat membiayai operasionalnya sendiri. Dengan begitu diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Penerapan PPK-BLUD oleh RSUD Idaman Banjarbaru ini juga memberikan keleluasaan dalam melakukan improvisasi, terobosan yang diperlukan serta sistem informasi yang mendukung jalannya operasional BLUD, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan rumah sakit, dengan tetap tidak berorientasi mencari keuntungan (non-profit oriented). Peningkatan kinerja keuangan tersebut diukur menggunakan analisis rasio keuangan yang dapat berperan sebagai “early warning system” bagi para stakeholders mengenai kondisi keuangan rumah sakit.

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Banjarbaru yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang merupakan tahun sesudah dilakukan penerapan PPK-BLUD. Sebagai tolok ukur yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan bagi RSUD Idaman Banjarbaru yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan–Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ini dilakukan dengan menggunakan 9 indikator keuangan yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, yaitu:

- Rasio Kas (Cash Ratio), yang memiliki pengertian sebagai suatu rasio untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek.
- Rasio Lancar (Current Ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.
- Periode Penagihan Piutang (Collection Period), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu.

- Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover), menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan pendapatan pada periode tertentu.
- Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset), merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.
- Imbalan Ekuitas (Return on Equity), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh keuntungan dari modal (ekuitas) yang ada.
- Perputaran Persediaan (Inventory Turnover), merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan persediaan yang dimiliki dalam perolehan pendapatan.
- Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan pendapatan yang berasal dari bukan pajak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional.
- Rasio Subsidi Biaya Pasien, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat pendapatan yang diperoleh dari subsidi yang diterima atas pasien yang dilayani.

RSUD Idaman Banjarbaru sebagai rumah sakit dengan status BLUD berkewajiban untuk meningkatkan produktivitas pelayanan yang berdampak pada peningkatan pendapatan operasional dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan yang lebih baik. Dengan peningkatan pendapatan yang lebih baik tersebut diperlukan pengukuran yang lebih menyeluruh tentang kinerja keuangan rumah sakit untuk melihat kemampuan rumah sakit dalam memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan sesudah penerapan PPK-BLUD. Terkait hal tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana capaian kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Banjarbaru setelah penerapan Pola

Pengelolaan Keuangan–Badan Layanan Umum Daerah?

2. Apakah hasil yang ditunjukkan atas penilaian kinerja keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Banjarbaru setelah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan–Badan Layanan Umum Daerah?

### **Kajian Literatur**

Kinerja (performance) adalah gambar mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Menurut Sucipto (dalam Yuangga, 2017:14) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (dalam Yuangga, 2017:15) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

Kinerja keuangan suatu organisasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja “*performing measurement*” ialah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas organisasi dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Gary Dessler (dalam Pasolong, 2013:182) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang/organisasi dibandingkan dengan standar yang ada. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dan sebagai salah satu alat untuk pengawasan dan evaluasi organisasi.

Menurut Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No.1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan" (2012), laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

Sedangkan menurut Hery dalam bukunya yang berjudul "Analisis Laporan Keuangan, Pendekatan Rasio Keuangan" (2015), Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis.

Dari ketiga pengertian laporan keuangan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang menyajikan informasi yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh rumah sakit yang telah berstatus BLUD terdiri atas Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas (Laporan Operasional), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Untuk penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam penelitian ini, laporan keuangan yang digunakan untuk pengukuran kinerja merupakan data yang diambil dari Neraca dan Laporan Operasional RSUD Idaman Kota Banjarbaru periode tahun 2013-2014.

Istilah Badan Layanan Umum/Daerah mulai masuk ke ranah publik sejak kelahiran Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terutama Bab XII pasal 68-69 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sebagai tindak lanjut dalam penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum bagi satuan kerja/kantor pemerintah pusat dan daerah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijabarkanlah dengan lebih jelas mulai dari konsep, persyaratan, penetapan, dan pencabutan BLU/D hingga pengelolaan keuangan BLU/D (Lukman, 2013).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 23 menyebutkan bahwa: "Badan Layanan Umum adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas".

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa BLU adalah instansi (satuan kerja pengguna anggaran/barang) yang berada di lingkungan pemerintah yang telah dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa penyediaan barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Artinya bahwa BLU boleh untuk mencari keuntungan. Akan tetapi mencari keuntungan bukan merupakan tujuan utama, karena tujuan utama dari BLU berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Suryaningsih, 2015). PPK BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut. BLUD diberikan keistimewaan dalam bentuk fleksibilitas pengelolaan keuangan, diantaranya sebagai berikut (Waluyo, 2011):

1. Pendapatan operasional dapat digunakan langsung, sesuai Rencana Bisnis dan Anggarannya tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara.
2. Anggaran belanja BLUD merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran.
3. Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut: Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas; Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; Menyimpan kas dan mengelola rekening bank; Melakukan pembayaran; Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; Memanfaatkan kas yang menganggur (*idle cash*) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
4. BLUD dapat mengelola piutang,
5. BLUD dapat mengelola utang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta memberikan nilai praktik bisnis yang sehat.
6. BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Pengadaan barang/jasa BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan.
8. BLUD dapat mengembangkan Kebijakan, Sistem, dan Prosedur Pengelolaan Keuangan sendiri.
9. BLUD dapat memperkerjakan tenaga professional non PNS.
10. Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian terhadap target keuangan yang dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Penilaian kinerja keuangan rumah sakit yang berbentuk BLU diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Dalam Pasal 4 (1) aspek keuangan meliputi rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU.

Pengukuran aspek keuangan dalam penelitian ini seperti yang tercantum dalam Pasal 4 (3), dilakukan dengan 9 (sembilan) rasio keuangan, yaitu:

1. Rasio Kas (*Cash Ratio*), yang memiliki pengertian sebagai suatu rasio untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek.
2. Rasio Lancar (*Current Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.
3. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu.
4. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*), menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan pendapatan pada periode tertentu.
5. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*), merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

6. Imbalan Ekuitas (Return on Equity), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh keuntungan dari modal (ekuitas) yang ada.
7. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover), merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan persediaan yang dimiliki dalam perolehan pendapatan.
8. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan pendapatan yang berasal dari bukan pajak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional.
9. Rasio Subsidi Biaya Pasien, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat pendapatan yang diperoleh dari subsidi yang diterima atas pasien yang dilayani.

Dengan menggunakan instrument rasio keuangan yang ada dalam Per-34/PB/2014 kinerja keuangan sebuah BLU dapat diukur dan dinilai kinerjanya dan dapat diberikan kriteria **BAIK**, **SEDANG** atau **BURUK** sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 8, sebagai berikut:

1. Kriteria **BAIK**, terdiri dari :
  - a. AAA, apabila  $TS > 95$ ;
  - b. AA, apabila  $80 < TS \leq 95$ ; dan
  - c. A, apabila  $65 < TS \leq 80$ .
2. Kriteria **SEDANG**, terdiri dari :
  - a. BBB, apabila  $50 < TS \leq 65$ ;
  - b. BB, apabila  $40 < TS \leq 50$ ; dan
  - c. B, apabila  $30 < TS \leq 40$ .
3. Kriteria **BURUK**, terdiri dari :
  - a. CC, apabila  $15 \leq TS \leq 30$ ; dan
  - b. C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan dicapai oleh BLU Kurang dari 15.

Pengukuran aspek keuangan dengan 9 (sembilan) rasio keuangan tersebut, dilakukan terhadap laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Banjarbaru yang terdiri atas Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas mulai

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang merupakan tahun sesudah dilakukan penerapan PPK-BLUD.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian *Mixed Method* yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut pendapat Sugiyono (2011), metode penelitian kombinasi (*mixed method*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, *reliable* dan obyektif.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan strategi metode campuran konkuren/sewaktu-waktu (*embedded concurrent mixed method*) yang menggabungkan antara data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu waktu dengan data kuantitatif sebagai metode primer yang memandu penelitian dan metode sekunder berupa wawancara sebagai data yang ditancapkan (*embedded*) kedalam metode kuantitatif yang lebih dominan.

Desain penelitian ini menggunakan *sequential explanatory designs*, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilaksanakan dalam dua tahap, dengan penekanan utama pada metode kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan RSUD Idaman Banjarbaru sebelum dan setelah berstatus BLUD Penuh menggunakan rasio-rasio dan pemberian skor yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014, yang kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk melihat perkembangan kinerja keuangan rumah sakit sebelum dan setelah menerapkan PPK-BLUD. Dari hasil analisis kuantitatif tersebut akan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data kualitatif yang dapat memberikan pembahasan yang lebih komprehensif, valid, *reliable* dan obyektif terhadap kinerja rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Kesimpulan yang dibuat dari hasil penelitian

hanya berlaku bagi instansi yang menjadi objek penelitian.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah RSUD Idaman Kota Banjarbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara terstruktur kepada pihak manajemen rumah sakit mengenai kondisi rumah sakit secara umum. Dan data sekunder berupa laporan keuangan rumah sakit dan data keuangan lainnya yang diperlukan untuk melakukan analisis kinerja keuangan pada rumah sakit.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview (wawancara)

Wawancara dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten di PPK-BLUD RSUD Idaman Banjarbaru (manajemen dan pegawai).

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini berupa profil RSUD Idaman Banjarbaru, struktur organisasi, visi, misi, laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), serta data keuangan lainnya sesuai dengan periode sampel, yaitu tahun 2013-2016 yang didapatkan dari manajemen rumah sakit.

c. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dari literatur yang membahas mengenai penilaian kinerja keuangan.

Rasio-rasio keuangan yang diukur dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Rasio keuangan yang digunakan untuk pengukuran kinerja meliputi:

1. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek.

2. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

3. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Periode penagihan piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu.

4. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Perputaran aset tetap menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan pendapatan pada periode tertentu.

5. Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

Imbalan atas aset tetap merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

6. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

Imbalan ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh keuntungan dari modal (ekuitas) yang ada.

7. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan persediaan yang dimiliki dalam perolehan pendapatan.

8. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat

penggunaan pendapatan yang berasal dari bukan pajak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional.

#### 9. Rasio Subsidi Biaya Pasien

Rasio subsidi biaya pasien merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat pendapatan yang diperoleh dari subsidi yang diterima atas pasien yang dilayani.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan terhadap Laporan Keuangan Sesudah Penerapan PPK-BLUD pada RSUD Idaman Banjarbaru Kota Banjarbaru dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian terhadap kinerja keuangan RSUD Idaman Kota Banjarbaru sesudah dilakukan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan periode sampel tahun 2013-2016 yang diukur melalui rasio keuangan yang mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Laporan Keuangan yang digunakan untuk menghitung rasio-rasio tersebut berasal dari Neraca dan Laporan Operasional selama kurun waktu tahun 2013-2016.

Hasil atas penilaian kinerja keuangan yang telah dilakukan terhadap RSUD Idaman Kota Banjarbaru sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja keuangan setelah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Kota Banjarbaru.

Berdasarkan tabel 1, dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan sesudah penerapan PPK-BLUD pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru mengalami fluktuasi pada empat tahun periode sampel. Nilai capaian kinerja tertinggi diperoleh pada tahun 2013 dan 2015 dengan total skor sebesar **13,75** sehingga memperoleh nilai kinerja sebesar **72,37%**. Namun, pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan total skor sebesar **11,75** sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar **61,84%** yang disebabkan oleh nilai rasio perputaran aset tetap yang sangat rendah karena adanya peningkatan nilai aset yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru, selain itu disebabkan juga adanya nilai Piutang tahun 2016 yang cukup besar sehingga mempengaruhi saldo Aset Lancar yang berpengaruh pada nilai capaian kinerja pada Rasio Lancar. Sedangkan jika dilihat selama periode sampel mulai tahun 2013-2016, hasil perhitungan rata-rata capaian kinerja keuangan RSUD Idaman Kota Banjarbaru memperoleh total skor **14,00** dengan nilai capaian kinerja sebesar **73,68%**.

**Tabel 1. Capaian Kinerja Keuangan Sesudah Penerapan PPK-BLUD**

Rasio	Maks. Skor	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
-Rasio Kas	2	1,50	1,50	0,50	0,50	1,50
-Rasio Lancar	2,5	1,50	1,50	2,50	1,00	1,50
-Colecting Period	2	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00
-FATO	2	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00
-ROFA	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
-ROE	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
-ITO	2	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00
-Rasio PNBP	2,5	1,75	2,25	2,25	2,25	2,00
-Rasio Subsidi Biaya Pasien	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Total Skor	19	13,75	13,25	13,75	11,75	14,00
-Kinerja Per-34		72,37	69,74	72,37	61,84	73,68

Rincian capaian kinerja keuangan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Kota Banjarbaru selama periode sampel mulai tahun 2013 sampai dengan 2016 sebagai berikut:

a. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Rasio Kas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara Kas dan Setara Kas dengan Kewajiban Jangka Pendek. Hasil perhitungan Rasio Kas pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru selama periode sampel tahun 2013-2016 (seperti ditunjukkan pada Tabel 2).

**Tabel 2. Rasio Kas tahun 2013-2016**

Tahun	%	Skor
2013	193,75	1,5
2014	211,94	1,5
2105	456,95	0,5
2016	76,45	0,5
Rata-Rata	234,77	1,5

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan Rasio Kas selama periode sampel mulai tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Dari tahun 2013 sampai dengan 2015 tren Rasio Kas menunjukkan peningkatan, akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan nilai sebesar 76,45%. Penurunan nilai rasio tersebut disebabkan karena adanya tagihan RSUD Idaman Kota Banjarbaru kepada pihak ketiga (BPJS) selama 4 bulan yang masih belum terbayar pada tahun 2016, sehingga mempengaruhi saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki RSUD Idaman Kota Banjarbaru. Persentase rata-rata yang ditunjukkan dari hasil perhitungan pada

tabel 2 tersebut adalah sebesar 234,77% dengan skor 1,5 karena berada pada level  $180 < RK \leq 240$ .

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jk. Pendek}} \times 100\%$$

Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek. Hasil perhitungan Rasio Lancar pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru selama periode sampel tahun 2013-2016 (seperti ditunjukkan pada Tabel 3).

**Tabel 3. Rasio Lancar tahun 2013-2016**

Tahun	%	Skor
2013	440,27%	1,5
2014	426,32%	1,5
2105	672,84%	2,5
2016	326,37%	1,0
Rata-Rata	466,45%	1,5

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan Rasio Lancar selama periode sampling mulai tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel 3. Dari tahun 2013 sampai dengan 2015 tren Rasio Kas menunjukkan peningkatan, akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan yang dengan nilai sebesar 326,37%. Sedangkan persentase rata-rata yang ditunjukkan dari hasil perhitungan tersebut adalah sebesar 466,45% dengan skor 1,5 karena berada pada level  $360 < RL \leq 480$ .

c. Periode Penagihan Piutang (*Collecting Periode*)

$$\text{Periode Penagihan Piutang} = \frac{\text{Piutang Usaha} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Periode Penagihan Piutang merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara Piutang Usaha dengan Pendapatan Usaha dalam 1 tahun. Hasil perhitungan Rasio Periode Penagihan Piutang pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru selama periode sampel tahun 2013-2016 (Tabel 4).

**Tabel 4. Periode Penagihan Piutang tahun 2013-2016**

Tahun	Kali	Skor
2013	17	2,0
2014	32	1,5
2105	11	2,0
2016	26	2,0
Rata-Rata	21	2,0

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa Hasil perhitungan Rasio Periode Penagihan Piutang selama periode sampling mulai tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel 4. Nilai rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2014 sebesar 32 kali dengan skor 1,5 dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2015 sebesar 11 kali dengan skor 2. Sedangkan hasil perhitungan rata-rata yang ditunjukkan adalah sebesar 21 kali dengan skor 2,0 karena berada pada level  $PPP < 30$ .

**d. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*)**

$$\text{Perputaran Aset Tetap} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turn Over*) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara Pendapatan Operasional dengan Aset Tetap. Dari rasio ini kita bisa melihat apakah pendapatan dari operasional perusahaan seimbang dengan penambahan aset tetap yang

dimiliki. Hasil perhitungan Rasio Perputaran Aset Tetap pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru selama periode sampel dari tahun 2013 hingga tahun 2016.2016, seperti ditunjukkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Rasio Perputaran Aset Tetap tahun 2013-2016**

Tahun	%	Skor
2013	46,46%	2,0
2014	79,37%	2,0
2105	40,20%	2,0
2016	12,03%	1,0
Rata-Rata	44,95%	2,0

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan Rasio Perputaran Aset Tetap selama periode sampling mulai tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel 5. Nilai rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2014 sebesar 79,37% dengan skor 2,0 dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2016 sebesar 12,03% dengan skor 1,0. Sedangkan persentase rata-rata yang ditunjukkan dari hasil perhitungan tersebut adalah sebesar 44,51% dengan skor 2,0 karena berada pada level  $PAT > 20$ .

**e. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*)**

$$\text{Imbalan atas Aset Tetap} = \frac{\text{Keuntungan/Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times \frac{\text{Surplus/Defisit sebelum Pos}}{n} \times 100\%$$

Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN/D, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi

dalam pengerjaan. Hasil perhitungan Rasio Imbalan atas Aset Tetap pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru tahun 2013-2016 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 6.

**Tabel 6. Rasio Imbalan atas Aset Tetap tahun 2013-2016**

Tahun	%	Skor
2013	9,50%	2,0
2014	23,43%	2,0
2105	39,39%	2,0
2016	8,51%	2,0
Rata-Rata	20,21%	2,0

Hasil perhitungan Rasio Imbalan atas Aset Tetap selama periode sampling mulai tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif namun secara skor yang diperoleh menunjukkan total skor yang sama sebagaimana terlihat pada tabel 6. Nilai rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2015 sebesar 39,39% dengan skor 2,0 dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2016 sebesar 8,51% dengan skor 2,0 dikarenakan pada tahun tersebut RSUD Idaman Kota Banjarbaru mengalami peningkatan nilai aset yang cukup signifikan yaitu pada aset tetap peralatan mesin dan gedung bangunan sehubungan dengan pindahnya RSUD Idaman Kota Banjarbaru ke bangunan baru yang disertai dengan penambahan peralatan yang baru juga. Sedangkan persentase rata-rata yang ditunjukkan dari hasil perhitungan tersebut adalah sebesar 20,21% dengan skor 2,0 karena berada pada level ROFA > 6.

#### f. Imbalan atas Ekuitas (*Return On Equity*)

$$\text{Imbalan atas Ekuitas} = \frac{\frac{\text{Surplus/Defisit sebelum Pos}}{\text{Keuntungan/Kerugian}}}{\frac{\text{Surplus/Defisit sebelum Pos}}{\text{Keuntungan/Kerugian}}} \times 100\%$$

Imbalan atas Ekuitas (*Return on Equity*) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara Surplus/Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN/D, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan. Hasil perhitungan Rasio Imbalan atas Ekuitas pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru selama periode sampel tahun 2013-2016 sebagai berikut:

**Tabel 7. Rasio Imbalan atas Ekuitas tahun 2013-2016**

Tahun	%	Skor
2013	16,25%	2,0
2014	26,76%	2,0
2105	78,32%	2,0
2016	10,73%	2,0
Rata-Rata	33,01%	2,0

Hasil perhitungan Rasio Imbalan atas Ekuitas selama periode sampling mulai tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif namun secara skor yang diperoleh menunjukkan total skor yang sama sebagaimana terlihat pada tabel 7. Nilai rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2015 sebesar 78,32% dengan skor 2,0 dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2016 sebesar 10,73% dengan skor 2,0 dikarenakan pada tahun tersebut RSUD Idaman Kota Banjarbaru mengalami peningkatan nilai aset yang cukup signifikan akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan surplus atas hasil kegiatan usahanya sehingga berpengaruh terhadap nilai ekuitas yang dimilikinya juga. Sedangkan persentase rata-rata yang ditunjukkan dari hasil perhitungan tersebut adalah sebesar 33,01% dengan skor 2,0 karena berada pada level ROE > 8.

### g. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Pendapatan BLU}} \times 1 \text{ hari}$$

Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha. Hasil perhitungan Rasio Perputaran Persediaan pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru tahun 2013-2016 seperti ditunjukkan selengkapnya pada Tabel 8.

**Tabel 8. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2013-2016**

Tahun	Kali	Skor
2013	21	1,0
2014	15	0,5
2105	11	0,5
2016	17	11,0
Rata-Rata	16	1,0

Hasil perhitungan Rasio Perputaran Persediaan selama periode sampling mulai tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel 8. Dimana nilai rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2013 sebesar 21 kali dan nilai rasio terendah diperoleh pada tahun 2015 dengan hasil perhitungan sebesar 11 kali. Sedangkan rata-rata hasil perhitungan yang diperoleh adalah 16 kali.

### h. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional

$$\text{Rasio PNBPN thd Biaya Operasional} = \frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan PNBPN dengan Biaya Operasional. Hasil perhitungan Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru tahun 2013-2016 (selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9).

**Tabel 9. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional tahun 2013-2016**

Tahun	%	Skor
2013	43,34%	1,75
2014	62,16%	2,25
2105	60,33%	2,25
2016	61,11%	2,25
Rata-Rata	56,74%	2,00

Hasil perhitungan Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional selama periode sampling mulai tahun 2013-2016 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagaimana terlihat pada tabel 9. Nilai rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2014 sebesar 62,16% dengan skor 2,25 dan nilai terendah diperoleh pada tahun 2013 sebesar 43,34% dengan skor 1,75. Sedangkan persentase rata-rata yang ditunjukkan dari hasil perhitungan tersebut adalah sebesar 56,74%, dan mendapatkan skor 2,0 yang merupakan skor tertinggi yaitu berada pada  $range 50 < PB \leq 57$ .

### i. Rasio Subsidi Biaya Pasien

$$\text{Rasio Subsidi Biaya Pasien} = \frac{\text{Jml Subsidi Biaya Pasien}}{\text{Pendapatan BLU}} \times 100\%$$

Rasio subsidi biaya pasien berguna untuk mengetahui perbandingan antara biaya pasien yang telah disubsidi dengan pendapatan BLU, sehingga diketahui apakah subsidi biaya pasien yang telah dilaksanakan selama ini sudah sesuai dengan rasio yang dianggarkan. Hasil perhitungan Rasio

Subsidi Biaya Pasien pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru tahun 2013-2016 ditunjukkan pada Tabel 10.

**Tabel 10. Rasio Subsidi Biaya Pasien tahun 2013-2016**

Tahun	%	Skor
2013	0,00%	0
2014	0,00%	0
2015	0,00%	0
2016	0,00%	0
Rata-Rata	0,00%	0

Hasil perhitungan Rasio Subsidi Biaya Pasien selama periode sampel mulai tahun 2013 hingga tahun 2016 semuanya menunjukkan angka 0% sebagaimana terlihat pada tabel 10. Hal ini disebabkan karena pasien tidak mampu yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan JKN sudah ditanggung pada program jaminan pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Banjarbaru sehingga RSUD Idaman Kota Banjarbaru tidak mengeluarkan biaya subsidi bagi pasien. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio biaya subsidi pasien tidak relevan untuk dihitung karena tidak pernah diberikan subsidi kepada pasien langsung dari rumah sakit. Persentase rata-rata yang ditunjukkan dari hasil perhitungan tersebut adalah sebesar 0%, dan mendapatkan skor 0 yang merupakan skor terendah yaitu berada pada *range*  $SBP \leq 1\%$ .

2. Hasil penilaian kinerja keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idaman Banjarbaru sesudah penerapan PPK-BLUD.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja keuangan yang telah dilakukan terhadap RSUD Idaman Kota Banjarbaru selama periode sampel tahun 2013-2016 sebagaimana yang tercantum dalam tabel 11, maka hasil penilaian kinerja keuangan yang diperoleh RSUD Idaman Kota Banjarbaru untuk periode sampel tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 11.

Berdasarkan tabel 11, dapat ditunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja keuangan sesudah penerapan PPK-BLUD pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru memperoleh kriteria yang hampir sama selama empat tahun periode sampel. Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2015 RSUD Idaman Kota Banjarbaru sebenarnya menunjukkan capaian kinerja yang fluktuatif, tetapi di dalam penilaian kriteria kinerja yang diperoleh berada level kriteria yang sama yaitu pada level  $65 < TS \leq 80$  sehingga menunjukkan hasil yang sama yakni memperoleh kriteria **BAIK** dengan kategori **A**. Namun, pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan hasil capaian penilaian kinerja memperoleh kriteria **SEDANG** dengan kategori **BBB**. Sedangkan jika dilihat selama periode sampel mulai tahun 2013-2016, hasil rata-rata penilaian kinerja keuangan RSUD Idaman Kota Banjarbaru dinyatakan memperoleh kriteria **BAIK** dengan kategori **A**.

**Tabel 11. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan Sesudah Penerapan PPK-BLUD**

Rasio	Max Skor	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
Total Skor	19	13,75	13,25	13,75	11,75	14,00
Kinerja Pertahun	34	72,37%	69,74%	72,37%	61,84%	73,68%
Kriteria Kinerja		A	A	A	BBB	A

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Keuangan RSUD Idaman Kota Banjarbaru setelah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mulai dari periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja keuangan sesudah penerapan PPK-BLUD pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru mengalami fluktuasi pada empat tahun periode sampel yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan 2016. Nilai capaian kinerja tertinggi diperoleh pada tahun 2013 dan 2015 dengan nilai capaian kinerja sebesar **72,37%** dengan total skor sebesar **13,75**, sedangkan capaian kinerja terendah diperoleh pada tahun 2016 dengan nilai capaian kinerja sebesar **61,84%** dengan total skor **11,75**.

Jika dilihat selama periode sampel mulai tahun 2013-2016, hasil perhitungan rata-rata capaian kinerja keuangan RSUD Idaman Kota Banjarbaru memperoleh nilai sebesar **68,42%** dengan total skor **14,00**.

2. Hasil penilaian kinerja keuangan sesudah penerapan PPK-BLUD pada RSUD Idaman Kota Banjarbaru memperoleh kriteria yang bervariasi selama tahun periode sampel yaitu tahun 2013-2016.

Hasil penilaian kinerja tertinggi diperoleh pada tahun 2013-2015 berada level kriteria yang sama yaitu pada level  $65 < TS \leq 80$  sehingga menunjukkan hasil yang sama yakni memperoleh kriteria **BAIK** dengan kategori **A**, sedangkan pada tahun 2016 merupakan tahun dimana RSUD Idaman Kota Banjarbaru mendapatkan hasil penilaian kinerja terendah dengan kriteria **SEDANG** kategori **BBB**.

Jika dilihat selama periode sampel mulai tahun 2013-2016, hasil rata-rata penilaian kinerja keuangan RSUD Idaman Kota Banjarbaru memperoleh predikat **BAIK (A)**.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amallia, Chairun, 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Sa'anin Sebelum Dan Setelah Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Studi Empiris pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Sa'anin)*. (diakses tanggal 11 November 2017)
- Chrishartoyo, Khairana Amalia. dkk.. 2017. *Analisi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2004-2015)*. *ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. Vol. 2.No.1. (diakses tanggal 11 November 2017)
- Deputi Akuntan Negara. 2015. *Pedoman Evaluasi Kinerja RSD-BLUD*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
[http://keuda.kemendagri.go.id/asset/datauplo ad/datainformasi/datin\\_data/358.png](http://keuda.kemendagri.go.id/asset/datauplo ad/datainformasi/datin_data/358.png)  
(diakses 11 November 2017).
- Jahra, Nurul, 2014. *Analisis Implementasi PPK- BLU Pada Rumah Sakit Daerah Kalisat-Jember*. *Student Reserch Article*. UNEJ Repository. (diakses tanggal 11 November 2017)
- Meidyawati, 2010. *Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi*. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Andalas. (diakses tanggal 11 November 2017)
- Mulyono, Bejo, 2013. *Pemantapan Implementasi PPK BLUD. Modul Pelatihan*. Kemendagri, Jakarta. (diakses tanggal 11 November 2017)
- Permendagri, No.61, 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*.
- Permenkeu. No.76, 2008. *Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- PP Nomor 23, 2005. *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*.
- PP Nomor 74, 2012. *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005.

- Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-34, 2014. tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU Bidang Layanan Kesehatan.
- Ratnawati, Varida Tri Eka et al.. 2016. *Financial Performance Analysis Of Hospital Dr. Moewardi Surakarta Before And After Defined As A Regional Public Service Agency. E-Jurnal Excelent*. Vol. 2 No.2. (diakses tanggal 11 November 2017)
- Suryaningsih, Ratna. 2015. *Kinerja Keuangan Layanan Kesehatan Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Studi kasus pada RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro). Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.15. No. 1 tahun 2015, Hal. 57-80. (diakses tanggal 11 November 2017)
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung. (diakses tanggal 11 November 2017)
- Undang-Undang Nomor 44, 2009. Tentang Rumah sakit.
- Yuangga, Aditya, 2017. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) (Studi Kasus Pada Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung). (diakses tanggal 11 November 2017)